BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Sebagai daerah perkotaan yang sedang berkembang dan tengah melakukan pembangunan di berbagai aspek pembangunan di wilayah perkotaan, Kota Pariaman juga berkomitmen untuk mewujudkan Pariaman sebagai Kota Hijau (*Pariaman Green City*). Upaya mewujudkan Kota Hijau atau yang saat ini lebih dikenal dengan *Green City* yang disebut juga sebagai kota ekologis atau kota yang sehat, adalah suatu kota dimana terdapat keseimbangan antara pembangunan dan perkembangan kota dengan kelestarian lingkungan (A. Zulkifli, 2015). Upaya perwujudan Kota Hijau di Kota Pariaman sejalan dengan isu global dewasa ini, yakni isu pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yang mana dapat diwujudkan melalui pengembangan Kota Hijau (*Green City*). Secara konseptual, untuk dapat terwujud sebagai *Green City*, terdapat beberapa indikator/komponen yang harus dipenuhi suatu kota, yakni; *Green Water, Green Planning and Design, Green Open Space, Green Waste, Green Building, Green Energy, Green Community, dan Green Transportation* (V. Kumurur, 2013).

Dalam wawancara pendahuluan yang penulis lakukan bersama Kepala Seksi Infrastruktur dan Penataan Ruang Bappeda Kota Pariaman (2018), dinyatakan bahwa konsep ini telah mulai diterapkan di Kota Pariaman sejak tahun 2012 hingga saat ini.

Namun dari 8 (delapan) indikator *Green City* yang disyaratkan, baru 3 (tiga) indikator saja yang dapat diimplementasikan di Kota Pariaman, yaitu *Green Planning and Design, Green Open Space* dan *Green Community*. Walaupun ketiga indikator ini sudah diterapkan dalam rentang waktu 8 tahun, namun tidak semua tahapan dapat dilaksanakan secara optimal, terutama dalam hal penerapan *Green City* dalam konteks *Green Community* yang mengedepankan pelibatan dan peran serta masyarakat, serta implementasi *Green Waste* yang berkaitan dengan pengelolaan sampah berbasis masyarakat (Bappeda, 2019).

Berdasarkan wawancara tersebut, juga diperoleh informasi bahwa baru sebesar 16,7 % sampah rumah tangga yang dapat diangkut oleh instansi terkait ke tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah, dimana 25% diantaranya masih terpusat pada wilayah Kecamatan Pariaman Tengah dan beberapa jalur yang merupakan jaringan jalan utama Kota, serta beberapa pusat kegiatan seperti pasar dan perkantoran. Sedangkan sebagian besar wilayah lainnya atau sebesar 75 %, pengelolaan sampah masih dilakukan secara mandiri oleh masyarakat yang pada pelaksanaannya belum sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku, seperti dibakar, ditimbun, dibuang ke sungai/kebun/lahan terbuka, dan sebagainya (Dinas LH Kota Pariaman, 2018).

Pernyataan diatas juga didukung oleh Hasil Study Environmental Health Risk Assesment (EHRA) tahun 2016 yang menyatakan bahwa masyarakat Kota

Pariaman masih melakukan pengelolaan sampah dominan dengan cara dibakar, yakni sebesar 67,9 % dari total responden (Study EHRA, Dinkes, 2016).

Pelayanan pengelolaan sampah yang dilakukan saat ini baru sebatas layanan rute armada angkutan sampah, baik melalui becak motor maupun dump truk/amrol truk, dimana sebagian besar sampah diangkut langsung ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah tanpa melalui tahapan pengelolaan terlebih dahulu, seperti pemilahan dan pengolahan lebih lanjut (Dinas LH Kota Pariaman, 2018). Hal ini sejalan dengan data yang diperoleh berdasarkan Status Capaian SSK Tahun 2016 yang menyatakan bahwa 90,7% masyarakat belum melakukan pemilahan sampah dari sumber (Bappeda Kota Pariaman, 2016). Disamping itu permasalahan lainnya adalah kecenderungan terjadinya peningkatan laju pertumbuhan penduduk Kota Pariaman sebesar 1,08 % per tahun (Pariaman Dalam Angka, Tahun 2017) dimana akan berkorelasi kuat dan berpengaruh terhadap potensi peningkatan volume timbulan sampah (F.T. Rahayu, 2012 dan UU 18/2008).

Untuk itu, dalam upaya peningkatan kualitas pengelolaan sampah, Pemerintah Pusat sejak 10 (sepuluh) tahun terakhir telah menerbitkan beberapa regulasi terkait, mulai dari Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah hingga Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Stategi Nasional (Jakstranas) dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Prinsip pengelolaan sampah dengan melibatkan dan memposisikan masyarakat sebagai aktor sehingga dapat

berpartisipasi aktif dalam mengurangi timbulan sampah merupakan salah satu opsi kebijakan yang tepat dalam upaya antisipasi peningkatan volume timbulan sampah perkotaan yang semakin hari terus meningkat seiring laju peningkatan jumlah penduduk (A. Ismawati, 2016).

Sejak tahun 2009 Pemerintah Kota Pariaman telah memfasilitasi terbentuknya kelembagaan dan membangun Fasilitas TPS 3R di 9 (sembilan) Desa/Kelurahan se-Kota Pariaman, namun berdasarkan data yang diperoleh dari instansi terkait, diketahui bahwa dari 9 (sembilan) lokasi TPS 3R yang telah dibangun hanya 2 (dua) TPS 3R saja yang masih berfungsi dan beroperasi hingga saat ini, yang mana pengelolaan kedua TPS 3R ini masih dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (Dinas Lingkungan Hidup, 2019). Sementara itu, 7 (tujuh) TPS 3R lainnya yang dikelola oleh masyarakat tidak beroperasi secara optimal sampai saat ini (SSK Kota Pariaman, 2016).

Mengacu kepada Juknis TPS 3R Kemen PUPR Tahun 2017, disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan TPS 3R, harus dilakukan secara sinergi dan berkesinambungan melalui, proses pelībatan masyarakat dan Pemerintah Daerah, proses pemberdayaan/penguatan masyarakat dan Pemerintah Daerah, serta pembinaan dan pendampingan Pemerintah Daerah untuk keberlanjutan TPS 3R (Kemen PUPR, 2017). Artinya, peran dan partisipasi masyarakat secara aktif sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan TPS 3R, yang mana hal ini diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Kebersihan Dinas LH Kota

Pariaman bahwa penyebab belum berfungsi dan beroperasinya 7 (tujuh) TPS 3R yang dikelola oleh masyarakat adalah karena rendahnya peran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan TPS 3R tersebut (Dinas LH Kota Pariaman, 2019). Sejalan dengan itu, F. Yuliana (2017) juga menyatakan bahwa dalam pengelolaan sampah permukiman diperoleh data yakni 56,% partisipasi masyarakat dikategorikan kurang berpartisipasi, sebanyak 25,0% partisipasi masyarakat sedang dan sebanyak 19,0% partisipasi masyarakat baik.

Atas dasar hal tersebut, penulis menilai perlu melakukan penelitian lebih lanjut terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah khususnya dalam operasional dan keberfungsian TPS 3R dalam rangka implementasi *Green Waste Management* menuju *Pariaman Green City*.

I.2. Pertanyaan Penelitian

- 1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di TPS 3R, dalam rangka mewujudkan Pariaman Green City melalui implementasi *Green Waste Management*?
- 2. Seberapa besar pengaruh faktor-faktor tersebut dan apa yang menjadi faktor paling dominan yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah?
- 3. Strategi apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam implementasi *Green Waste Management* pada TPS 3R?

I.3. Tujuan Penelitian

- Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah sebagai bentuk implementasi Green Waste Management di TPS 3R di Kota Pariaman
- Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor-faktor tersebut dan mengetahui apa yang menjadi faktor dominan yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah
- 3. Untuk mengetahui strategi apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah sebagai bentuk implementasi *Green Waste Management* di Kota Pariaman

I.4. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk dapat memberikan fokus dan arah yang jelas dalam mencapai tujuan penelitian di atas, dan karena keterbatasan waktu serta biaya, maka penelitian ini dibatasi oleh hal-hal sebagai berikut :

- Secara substansi penelitian ini fokus kepada hal-hal terkait hambatan, kendala dan strategi dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Pariaman, dan fokus kepada tahap pewadahan dan pengolahan sampah yang dilakukan di tingkat masyarakat.
- Lingkup wilayah penelitian adalah pada 7 (tujuh) lokasi Tempat Pengolahan
 Sampah (TPS) 3R di Kota Pariaman yang dikelola oleh masyarakat dari 9

- (Sembilan) TPS 3R yang ada di Kota Pariaman, dengan asumsi 2 (dua) lokasi TPS 3R yang dikelola Pemerintah telah berjalan secara optimal.
- 3. Partisipasi masyarakat terkait pengelolaan sampah dalam hal ini adalah melalui upaya *reduce*, *reuse* dan *recycle* (3R) sebagai bentuk implementasi *Green Waste Management*, dengan bentuk konkrit pada kegiatan pewadahan dan pengolahan sampah.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah:

- 1. Dapat memberikan kontribusi sebagai referensi terbaru dalam penelitian berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam implementasi *green waste management*, khususnya pada tahapan kegiatan pewadahan dan pengolahan sampah.
- 2. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kota Pariaman melalui instansi teknis terkait dalam upaya optimalisasi Pengelolaan Sampah di Kota Pariaman dengan prinsip *Green Waste Management* menuju Pariaman Green City.
- 3. Secara konkrit dapat dijadikan bahan masukan untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang tingkat urgensi partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keberhasilan pengelolaan sampah berbasis 3R.

I. 6. Sistimatika Penulisan

Agar tulisan ini memberikan pembahasan yang baik dan terarah, maka disusun berdasarkan sistematika penulisan yaitu sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan beberapa hal umum seperti Latar Belakang, Pertanyaan Penelitian, Tujuan Penelitian, Ruang Lingkup Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Adapun dalam bab ini akan dijelaskan dasar teori yang digunakan dalam kajian terhadap topik penelitian dan yang berkaitan dengan lingkup masalah yang akan diteliti, meliputi tinjauan terkait Konsep Kota Hijau (*Green City*), tinjauan secara umum tentang sampah dan pengelolaan sampah, pengelolaan sampah dalam konteks implementasi *Green Waste Management*, serta tinjauan terkait partisipasi masyarakat, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dan upaya atau strategi peningkatan partisipasi masyarakat.

Bab III : Metodologi Penelitian

Bab ini merupakan uraian dan pembahasan terkait metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian, meliputi pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, *tools* dan *instrument* penelitian, konseptual model penelitian, penentuan populasi dan sampling, teknik analisis data dan kerangka logis penelitian.

Bab IV. Hasil dan Pembahasan

Bab ini akan menguraikan tentang pembahasan berkaitan dengan hasil analisis dan pengolahan data yang telah didapatkan dari proses pengumpulan data yang dilakukan. Dalam bab ini akan dijabarkan tahapan sesuai proses penelitian yang diklasifikasikan pada 2 (dua) tahapan kegiatan pewadahan dan pengolahan sampah.

Bab V. Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran serta rekomendasi untuk pengambilan kebijakan, serta menjadi referensi dan pengembangan bagi penelitian selanjutnya.